

**PELAKSANAAN ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN DI PT. ASURANSI  
KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SURAKARTA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**

**TRI MARTONO ADI NUGROHO**  
**NIM. C. 100060024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



**Inayah, SH, M.H**

Pembimbing II

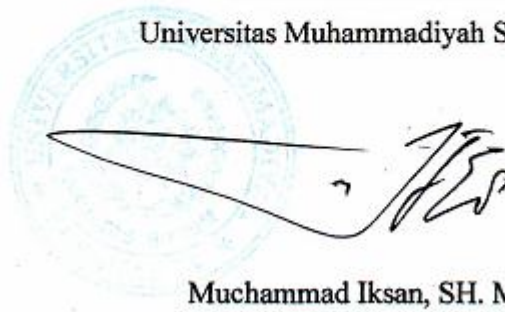


**Moh. Sandjoyo, SH., M.Hum**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Muchammad Iksan, SH. M.H.**

## **ABSTRAKSI**

### **PELAKSANAAN ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SURAKARTA**

**TRI MARTONO ADI NUGROHO**

NIM. C 100060024

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta. 2) Mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.*

*Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.*

*Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu : Penerimaan permintaan kredit limit dan atau perubahan serta dokumen pendukung dari calon tertanggung dan diregistrasi, Dilakukan registrasi surat masuk dan verifikasi dokumen, Setelah data lengkap dilakukan proses analisa kelayakan debitur/ buyer untuk penentuan kapasitas credit limit sesuai kriteria yang ditetapkan pada kebijakan standar analisa, Apabila layak, dilakukan koordinasi dengan unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty sesuai SOP reasuransi, Setelah disetujui unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty, maka diterbitkan endorsement persetujuan credit limit dan surat pengantar ke tertanggung sekaligus menyampaikan produksi ke unit keuangan untuk dilakukan penagihan premi ke tertanggung, Setelah menerima memo, persyaratan khusus polis (copy) dan manual pelaksanaan endorsement credit limit (copy) maka unit keuangan mengirim surat penagihan ke tertanggung, Penagihan sesuai SOP penagihan dan dilakukan proses monitoring dan penagihan lanjut, Penerimaan pembayaran premi dan bukti pembayaran di unit keuangan dan akuntansi Kantor Cabang. 2) Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, umumnya berasal dari pemohon, yaitu mengenai ketidaklengkapan dokumen, calon Tertanggung Tidak Memenuhi Pertimbangan 5C yaitu Karakter (character), kemampuan (capability), modal (capital), jaminan (collateral), dan kondisi ekonomi (condition of economic) dan permasalahan terakhir yaitu mengenai debitur/buyer yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Askrindo.*

*Kata Kunci: Asuransi Kredit Perdagangan*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF TRADE CREDIT INSURANCE IN PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SURAKARTA**

**TRI MARTONO ADI NUGROHO**

NIM. C 100060024

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*The purpose of this study was to: 1) Determine the mechanisms of implementation of Trade Credit Insurance in PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta. 2) Know the issues that arise in the implementation of the Trade Credit Insurance in PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.*

*Method of approach used in this study is the empirical judicial approach. Specification of research in writing this law is a descriptive analytical. Data types such as primary and secondary data, which consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Method of data analysis used is deductive data analysis. Deductive method is a method of drawing conclusions from things that are common to the writing of a special nature.*

*The results obtained conclusions: 1) implementation mechanism Trade Credit Insurance in PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta implemented with several stages, namely: Acceptance and request a credit limit or change as well as supporting documents from the prospective insured and registered, the registration Do incoming mail and document verification, Once complete the data analysis process is carried out feasibility debtor / buyer for the determination capacity credit limit according to the criteria set out in the standard policy analysis, When feasible, the reinsurance unit to coordinate with the terms and conditions of the pattern according to SOP reinsurance treaties, reinsurance unit Upon approval of the terms and provisions of the treaty pattern, then published endorsement credit approval limit and a letter of introduction to the insured at the same time delivering the production to finance unit to do billing premiums to the insured, after receiving the memo, special requirements policy (copy) and manual execution of endorsement credit limit (copy) the financial unit sent a letter to the insured billing, invoicing and billing is done according to SOP process further monitoring and billing, payment acceptance and payment of premium in finance and accounting unit of the Branch Office. 2) The problems that arise in the implementation of the Trade Credit Insurance in PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, generally come from the applicant, ie the incomplete documentation, the prospective insured Not Meet the Characters Consideration 5C (character), ability (capability), capital (capital), security (collateral), and economic conditions (condition of economic) and the last problem is the debtor / buyer who submitted does not meet the criteria set by Askrindo.*

*Keywords : Trade Credit Insurance*

## PENDAHULUAN

Salah satu produk PT. Askrindo yang saat ini dijalankan adalah Asuransi Kredit Perdagangan (Askredag). Asuransi Kredit Perdagangan adalah merupakan salah satu produk untuk menjamin resiko kegagalan pembayaran transaksi perdagangan kredit yang dilaksanakan *Seller* kepada *Buyers* sebagai akibat dari *Buyers* insolvensi atau *protracted default* (terjadi tunggakan berlarut-larut). Konsep perikatan yang mendasari pertanggungan Asuransi Kredit Perdagangan adalah konsep perikatan pertanggungan antara Tertanggung dengan Penanggung yang memuat penawaran 3 (tiga) jasa pokok kepada Tertanggung yaitu membantu *Seller* dalam menentukan besarnya kredit limit kepada *Buyer*, membantu *seller* dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran dari *Buyer* (*problem solving*) dan memberikan proteksi resiko terhadap kerugian *seller* bilamana *buyer* insolvensi atau mengalami *protracted default*. Disamping 3 (tiga) jasa pokok yang ditawarkan tersebut, Asuransi Kredit Perdagangan juga memberikan beberapa manfaat lain yang dapat membantu *seller* dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain membantu tugas manajemen resiko perusahaan dalam mengelola resiko, membantu perencanaan pembentukan cadangan piutang, membantu dalam meningkatkan volume penjualan, membantu menjaga struktur aktiva lancar, melindungi kerugian macet, membantu meningkatkan keuntungan, dan membantu dalam memperoleh akses *trade finance*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SURAKARTA".

Penelitian ini dibatasi pada mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta? 2) Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta. 2) Mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mempunyai hubungan dengan mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan. Sedangkan pendekatan empiris yaitu upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata

dari sisi norma hukum yang mengatur mengenai hukum asuransi akan tetapi juga permasalahan dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah masyarakat di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, di mana PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta terdapat permasalahan dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan, sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Tahap analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan dirasa lengkap, lalu diadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu merupakan tatacara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, yang artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dokumen-dokumen adalah data yang harus dipelajari seutuhnya. Dari hasil analisa tersebut lalu disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Asuransi Kredit Perdagangan

Asuransi Kredit Perdagangan adalah merupakan salah satu produk untuk menjamin resiko kegagalan pembayaran transaksi perdagangan kredit yang dilaksanakan *Seller* kepada *Buyers* sebagai akibat dari *Buyers* insolvensi atau *protracted default* (terjadi tunggakan berlarut-larut). Konsep perikatan yang mendasari pertanggungan Asuransi Kredit Perdagangan adalah konsep perikatan pertanggungan antara Tertanggung dengan Penanggung yang memuat penawaran 3 (tiga) jasa pokok kepada Tertanggung yaitu membantu Seller dalam menentukan besarnya kredit limit kepada *Buyer*, membantu seller dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran dari *Buyer* (*problem solving*) dan memberikan proteksi resiko terhadap kerugian seller bilamana buyer insolvensi atau mengalami *protracted default*.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dua (2) pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Asuransi Kredit Perdagangan didefinisikan sebagai perjanjian dua (2) pihak, dimana pihak pertama (Penanggung/*Insurer*) mengikatkan diri kepada pihak kedua (Tertanggung/*Insured*) dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak



kedua (Tertanggung/*Insured*) karena kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang (*Outstanding Amount*) oleh Debitur (*Insured Buyers*) sesuai dengan kontrak perdagangan (Perjanjian kredit tertentu) antara pihak kedua (Tertanggung/*Insured*) dengan Debitur (*Insured Buyers*) akibat Debitur (*Insured Buyers*) mengalami *Insolvensi* atau *Protracted Default*.

### **Dasar Hukum Asuransi Kredit Perdagangan**

Adapun dasar hukum asuransi kredit perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Surat Persetujuan Departemen Keuangan No. S. 5314/LK/203, tanggal 26 September 2003 tentang persetujuan penyelenggaraan Asuransi Kredit Perdagangan.
- c. Surat Keputusan Direksi PT. Askrindo No. 107/KEP/DIR/XI/2008 tentang Ketentuan Umum Usaha Penjaminan Dalam Rangka Penerapan Prinsip Kehati-hatian.

### **Manfaat Asuransi Kredit Perdagangan**

Manfaat asuransi kredit perdagangan bagi tertanggung adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Tertanggung dan Buynya dalam meningkatkan *Sales Turnover*;
- b. Membantu *credit policy* Tertanggung kepada Buynya;
- c. Membantu Tertanggung untuk mengurangi cadangan piutang ragu-ragu;
- d. Membantu Tertanggung untuk mendapatkan akses *trade financing*.

Sedangkan keunggulan dari Asuransi Kredit Perdagangan adalah:

- a. Membantu memberikan layanan Asuransi Kredit Perdagangan Domestik dan Ekspor

- b. Bagian dan produk link Lembaga Penjaminan yang memberikan jasa produk proteksi resiko keuangan lainnya
- c. Lembaga Penjaminan bekerjasama dengan Asuransi Kredit Internasional dalam pertanggung jawaban ekspor dan dalam memperoleh backup reasuransi

### **Dokumen yang Dibutuhkan dalam Asuransi Kredit Perdagangan**

Untuk keperluan administrasi dan penilaian layak tidaknya bertanggung mendapatkan asuransi kredit perdagangan, PT. Askrindo mensyaratkan bertanggung untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain : Surat permohonan, Akte pendirian & pengesahan, Profil Perusahaan, Copy KTP / Paspor Pemilik / Direktur, SIUP / SIUJK, NPWP, Surat Ijin Domisili, Sertifikat Asosiasi, Laporan keuangan (neraca & laporan laba rugi 2 tahun terakhir), Rekening Koran (6 bulan terakhir), SPKMGR (Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta**

Asuransi Kredit Perdagangan merupakan pemberian jaminan *non loan* untuk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi dalam perdagangan barang, misalnya antara produsen dan distributornya, distributor dengan pengecer. Fungsi lain dari produk ini ialah memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (*credit policy*) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar.

Mekanisme kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta adalah sebagai berikut: Tahap 1, yaitu penerimaan permintaan kredit limit dan atau perubahan serta dokumen pendukung dari calon tertanggung dan diregistrasi. Tahap 2, dilakukan registrasi surat masuk dan verifikasi dokumen. Tahap 3, setelah data lengkap dilakukan proses analisa kelayakan debitur / buyer untuk penentuan kapasitas credit limit sesuai kriteria yang ditetapkan pada kebijakan standar analisa. Tahap 4, apabila layak, dilakukan koordinasi dengan unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty sesuai SOP reasuransi. Tahap 5, setelah disetujui unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty, maka diterbitkan endorsement persetujuan credit limit dan surat pengantar ke tertanggung sekaligus menyampaikan produksi ke unit keuangan untuk dilakukan penagihan premi ke tertanggung. Tahap 6, setelah menerima memo, persyaratan khusus polis (copy) dan manual pelaksanaan endorsement credit limit (copy) maka unit keuangan mengirim surat penagihan ke tertanggung. Tahap 7, penagihan sesuai SOP penagihan dan dilakukan proses monitoring dan penagihan lanjut. Tahap 8, penerimaan pembayaran premi dan bukti pembayaran di unit keuangan dan akuntansi Kantor Cabang.

Calon tertanggung diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan asuransi kredit perdagangan. Dalam melakukan pemberian asuransi kredit perdagangan, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut :

- a. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta hanya memberikan asuransi kredit perdagangan apabila permohonan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk asuransi kredit perdagangan baru, perpanjangan jangka waktu, maupun permohonan perubahan persyaratan asuransi kredit perdagangan.
- b. Permohonan asuransi kredit perdagangan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.
- c. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan asuransi kredit perdagangan.

Setelah proses *policy underwriting* selesai dilakukan, maka pihak Askrindo juga melakukan analisa terhadap buyer calon tertanggung/seller yang diajukan pertanggungannya, analisa tersebut dinamakan analisa buyer underwriting. Buyer Underwriting merupakan proses analisa untuk menetapkan kelayakan dan kapasitas kredit limit atas buyer-buyer calon tertanggung/seller yang diajukan pertanggungannya dengan berdasar pada Form B-AKP dan dokumen pendukung yang terdiri dari:

- a. Laporan perkembangan penjualan perbulan periode 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Laporan posisi outstanding piutang pada akhir periode laporan untuk seluruh debitur/buyer yang akan dipertanggungkan.
- c. Laporan aging piutang perbulan posisi 6 (enam) bulan terakhir untuk seluruh debitur/buyer yang akan dipertanggungkan.

Proses buyer underwriting pada analisa asuransi kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta terbagi menjadi 2 (dua) kelompok analisa, yaitu analisa umum dan analisa khusus. Proses ini diterapkan terhadap 3 kriteria buyer yang berbeda yaitu:

a. Atas debitur/buyer yang telah memiliki hubungan dagang dengan tertanggung/seller minimal 2 (dua) tahun :

1) Analisa umum

Seluruh informasi umum yang diperoleh dari tertanggung/seller atau sumber data lainnya seperti media massa dan perusahaan penyedia data terkait debitur/buyer meliputi informasi pemilik, sarana dan prasarana usaha, saluran distribusi dan wilayah pemasaran.

2) Analisa khusus

Dalam analisa khusus ini PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta akan mencari informasi mengenai karakteristik dari debitur/buyer yang diperoleh dari tertanggung/seller. Adapun informasi-informasi yang diperlukan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta adalah :

a) Penilaian aging (umur) piutang

Penilaian aging piutang dimaksudkan untuk mengetahui perilaku bayar dari debitur/buyer. Hasil analisa ini terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu lancar, kurang lancar dan macet, yaitu sebagai berikut:

(1) Aging piutang debitur/buyer dinyatakan lancar apabila outstanding piutang menurut aging posisi terakhir berada dalam

periode kredit (Term of Payment) dan dinyatakan “Dalam Perhatian Khusus” jika outstanding piutang menurut aging posisi terakhir berada dalam posisi belum melewati periode overdue.

(2) Aging piutang debitur/buyer dinyatakan kurang lancar apabila outstanding piutang menurut aging posisi terakhir berada pada periode melebihi periode overdue (masih berada pada masa protacted default).

(3) Aging piutang debitur/buyer dinyatakan macet apabila outstanding piutang berada dalam periode setelah memasuki masa klain (setelah masa protacted default berakhir).

b) Penilaian kapasitas debitur /buyer

Penilaian kapasitas debitur /buyer dilakukan untuk menilai besarnya kapasitas debitur/buyer dengan tertanggung/seller sesuai dengan kredit limit yang ditetapkan oleh tertanggung/seller. Analisa kapasitas debitur /buyer ini mengacu pada data-data penjualan dan posisi piutang terakhir yang disampaikan.

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam menilai kapasitas kredit limit diperoleh dari rumus yaitu:

$$\frac{\text{Total penjualan} - \text{Piutang}}{n \times (\text{TOP} + \text{Periode Overdue})}$$

Keterangan:

Total penjualan : Jumlah penjualan selama n bulan terakhir yang dilaporkan

Piutang : Posisi data piutang bulan terakhir yang dilaporkan

n : Jumlah bulan penjualan yang dilaporkan

TOP : Periode kredit debitur/buyer yang diberikan tertanggung/seller, ditetapkan dalam jumlah hari.

Periode overdue : Masa toleransi yang ditetapkan dalam polis, ditentukan dalam jumlah hari.

Hasil perhitungan kapasitas di atas akan dijadikan acuan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam memberikan nilai kredit limit yang diajukan oleh tertanggung/seller kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta.

c) Trend pengambilan/pembelian barang oleh debitur/buyer

Analisa ini untuk mengetahui data pembelian barang yang dilakukan oleh debitur/buyer dari tertanggung/seller setiap bulannya selama 1 (satu) tahun terakhir.

b. Atas debitur/buyer yang telah memiliki hubungan dagang dengan tertanggung/seller namun kurang dari 2 (dua) tahun

Proses buyer underwritingnya sama dengan proses di atas, namun dalam proses analisanya juga dilakukan penilaian terhadap pengalaman debitur tersebut sebagai distributor produk lain atau pengalaman di bidang usahanya (minimal 2 (dua) tahun) dengan tujuan untuk melihat kemampuan dan pengalaman Debitur / Buyer dalam menangani usaha distribusi (kedistributoran).

c. Atas Debitur / Buyer baru atau belum memiliki hubungan dagang dengan Tertanggung/Seller

Proses analisa buyer underwriting pada tapa ini sama dengan proses pada butir diatas, dengan menambahkan penilaian terhadap :

- 1) Pengalaman Debitur / Buyer tersebut sebagai distributor produk lain atau pengalaman di bidang usahanya dengan tujuan untuk melihat kemampuan dan pengalaman Debitur / Buyer dalam menangani usaha distribusi (kedistributoran).
- 2) Penilaian kapasitas berdasarkan target yang ditetapkan Tertanggung/Seller. Untuk melihat kemampuan Debitur / Buyer dalam memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan Tertanggung/Seller.

Dalam hal terdapat permohonan Credit Limit pada masa pertanggungan (penambahan atau pengurangan Credit Limit atau penambahan debitur baru), proses analisa juga berdasar pada Analisis Umum dan Analisa Khusus. Khusus terhadap permohonan penambahan Credit Limit, penentuan kapasitas sebagai dasar penentuan Credit Limit dilakukan melalui pendekatan asumsi dengan menggunakan target penjualan dan harga real produk di sebagai dasar perhitungan.

Setelah proses analisa *policy underwriting* dan *buyer underwriting* dirasa memenuhi persyaratan dan ketentuan, maka langkah selanjutnya pemberian putusan apakah permohonan tersebut ditolak atau diterima. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, maka pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dapat memberikan keputusan sebagai berikut:



a. Setuju, dengan kriteria :

- 1) Debitur / Buyer cukup berpengalaman dalam bidang kedistributoran dan/atau
- 2) Memiliki sarana/prasarana pendukung yang cukup memadai, saluran distribusi yang cukup banyak serta wilayah pemasaran yang cukup luas dan/atau
- 3) Kapasitas cukup mendukung dan/atau
- 4) Umur piutang berada dalam TOP + Periode Overdue dan/atau
- 5) Performa pembelian cukup baik

Hasil persetujuan dapat berupa :

- 1) Nilai Credit Limit sesuai permohonan Tertanggung/Seller.
- 2) Nilai Credit Limit tidak sesuai (kurang dari) permohonan Tertanggung/Seller.

b. Tolak, dengan kriteria :

- 1) Umur piutang melebihi TOP + Overdue dan / atau
- 2) Debitur / Buyer diketahui memiliki performa kurang baik dalam kedistributoran dan/atau
- 3) Debitur / Buyer diketahui performa pertanggungan yang kurang baik (klaim) dan/atau
- 4) Debitur / Buyer diketahui bermasalah dengan hukum dan/atau
- 5) Lain-lain

Apabila pengajuan asuransi kredit perdagangan disetujui oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, maka resiko yang ditanggung

oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta adalah kemungkinan kerugian yang diderita Tertanggung akibat jumlah outstanding yang tidak dibayarkan, disebabkan debitur mengalami : insolvensi dan protracted default. Insolvensi, yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan protracted default adalah gagal bayar sejumlah piutang oleh salah satu bayer sejak tanggal jatuh tempo tertua dalam kurun waktu tertentu.

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam menjamin risiko tertanggung juga memberikan pengecualian pertanggungan, yaitu sebagai berikut:

a. Individu

Jumlah outstanding berasal dari individu yang bertindak bukan atas nama perusahaan melainkan atas namanya sendiri, tidak dapat dipertanggungkan dalam polis ini.

b. Pemerintah

Jumlah outstanding yang berasal dari Lembaga Pemerintahan, ABRI, Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang secara hukum tidak bisa dinyatakan pailit, tidak dapat dipertanggungkan dalam polis asuransi kredit perdagangan.

c. Benda dan Bunga

Denda dan Bunga akibat keterlambatan pembayaran jumlah outstanding oleh Debitur tidak dipertanggungkan dalam polis ini.

d. Hubungan Afiliasi

Jika tertanggung dengan debitur mempunyai hubungan khusus diluar hubungan dagang, dalam hal ini termasuk hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan, hubungan manajerial antara tertanggung dan debitur, tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam polis ini.

e. Kejadian-Kejadian Khusus

Kegagalan pembayaran jumlah outstanding oleh debitur yang disebabkan kejadian-kejadian sebagai berikut tidak mendapatkan ganti rugi :

- 1) Reaksi Nuklir, sentuhan Radio Aktif dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur.
- 2) Terjadinya salah satu risiko politik di dalam negeri yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur seperti:
  - a) Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
  - b) Invasi atau infiltrasi musuh;
  - c) Keadaan perang baik pemerintah terlibat secara pertanggungjawab atau 15 (lima belas) hari setelah penanggungjawab memberitahukan kepada tertanggung bahwa polis telah dibatalkan. deklarasi ini dilakukan dengan menggunakan formulir Deklarasi Penjualan.

Sedangkan mengenai pembayaran ganti rugi antara Penanggungjawab dalam hal ini adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta kepada tertanggung, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembuatan Formulir Pengajuan Klaim

Formulir Pengajuan Klaim dalam bentuk lengkap diterbitkan oleh Penanggung sesuai tujuannya dan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung serta harus diserahkan kepada Penanggung paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Tertanggung dinyatakan berhak untuk mengajukan klaim.

b. Perhitungan Ganti Rugi

Penanggung akan menghitung kerugian Tertanggung mulai saat Tertanggung berhak mengajukan klaim atas suatu Debitur. Jumlah kerugian tersebut akan dikurangi dengan sejumlah biaya yang bisa diselamatkan oleh Tertanggung dan jumlah sebagai berikut :

- 1) Pada saat Tertanggung berhak mengajukan klaim, Tertanggung mungkin telah mengeluarkan Nota Kredit sebelumnya untuk mengurangi kewajiban Debitur.
- 2) Debitur mengurangi kewajibannya terhadap Tertanggung melalui tagihan penjualan barang kepada Tertanggung.

c. Hak Tertanggung untuk mengajukan klaim

Tertanggung dapat mengajukan klaim apabila :

- 1) Dalam hal Debitur dinyatakan insolvensi, tuntutan ganti rugi dapat diajukan begitu pernyataan insolvensi tersebut dikeluarkan oleh Pihak yang Berwenang.

- 2) Dalam hal terjadinya protracted default atas suatu debitur, tuntutan ganti rugi dapat diajukan setelah empat (4) bulan sejak tanggal jatuh tempo invoice pertama.

d. Pembatasan oleh Credit Limit

Penanggung hanya berkewajiban membayar kerugian sebesar prosentase pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Khusus Polis untuk setiap credit limit yang telah ditetapkan atas setiap debitur, kecuali biaya-biaya dan pengeluaran lain yang diatur dalam Polis asuransi kredit perdagangan.

Adapun batalnya hak tertanggung atas ganti rugi dan pembatalan pertanggungan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Batalnya Hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi sehubungan dengan debitur tertentu apabila :

- 1) Tertanggung tidak memenuhi semua kewajiban yang tertulis didalam polis asuransi kredit perdagangan.
- 2) Tertanggung memberikan informasi yang tidak benar.
- 3) Tertanggung menyimpan atau menahan informasi yang penting sifatnya bagi penanggung.

Semua hal tersebut di atas berlaku juga bagi pihak lain yang bertindak atas nama Tertanggung.

b. Jika tidak saat penilaian risiko, tertanggung dengan sengaja menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, maka Pertanggungan ini dapat dibatalkan oleh penanggung. Hal ini berlaku juga terhadap semua

pihak yang bertindak secara sah demi hukum sebagai pihak yang terkait dengan polis asuransi kredit perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat peneliti jelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan asuransi kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Prinsip *Insurable Interest*

Dalam hukum asuransi ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya. Prinsip *Insurable Interest* tercantum dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi : “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.

Jelas dari ketentuan diatas, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakannya perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian. Mengenai syarat kepentingan agar dapat diasuransikan diatur dalam Pasal 268 KUHD. Masalah selanjutnya adalah mengenai kapan kepentingan itu harus ada. Apabila memperhatikan Pasal 250 KUHD jelas dikatakan bahwa kepentingan harus ada pada saat diadakan perjanjian asuransi. Akan tetapi, sebagian besar sarjana berpendapat bahwa pengertian kepentingan harus

diartikan bukan pada waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi.

## 2. Prinsip Itikad Baik/Kejujuran

Yaitu prinsip adanya itikad baik atas dasar saling mempercayai antara pihak Penanggung dengan pihak Tertanggung dalam melaksanakan kontrak penutupan pertanggungan (asuransi). Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku juga pada perjanjian asuransi. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan mengenai hal tersebut, seperti diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) : “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

## 3. Prinsip *Indemnity* (Ganti Kerugian)

Dalam uraian pembahasan di atas telah diutarakan bahwa fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh Tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh Tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini yang

merupakan inti dari prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas. Prinsip ini tersirat dari Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu” yang berbunyi sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk menggantikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

## **B. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta**

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta telah menetapkan syarat-syarat seperti dijabarkan di atas untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi kredit perdagangan di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta adalah :

### **1. Ketidaklengkapan Dokumen**

Masalah ketidaklengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan asuransi kredit perdagangan biasanya terjadi karena ketidaktelitian dari pihak tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan asuransi kredit



perdagangan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan asuransi kredit perdagangan belum lengkap. Pada kenyataannya data-data yang diperlukan oleh pihak perusahaan asuransi dalam hal ini untuk persyaratan mutlak dalam suatu prosedur pengajuan asuransi kredit seringkali mengalami hambatan.

Dalam mengatasi hambatan ini PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta akan meminta calon tertanggung melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak dapat dilengkapi, maka proses pemberian asuransi kredit perdagangan tidak dapat diteruskan.

2. Calon Tertanggung Tidak Memenuhi Pertimbangan 5C.

Karakter (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economic*) merupakan juga dasar pertimbangan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam memberikan asuransi kredit perdagangan. Apabila calon tertanggung tidak memenuhi prinsip 5C ini, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta kemungkinan tidak akan memberikan asuransi kredit perdagangan kepada calon tertanggung tersebut. Namun prinsip 5C ini tidak bersifat mutlak dan akumulatif.

3. Debitur/buyer yang diajukan tidak memenuhi kriteria

Debitur/buyer yang diajukan tidak memenuhi kriteria untuk diasuransikan menghambat PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta untuk memberikan asuransi kredit perdagangan. Kriteria-kriteria seperti yang telah

dijabarkan di atas merupakan dasar pertimbangan bagi PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta untuk memberikan asuransi kredit perdagangan atau tidak, dan menjadi tolak ukur untuk menilai itikad baik calon tertanggung dalam mengajukan permohonan asuransi kredit perdagangan, apabila kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi, berarti calon tertanggung tidak beritikad baik dan dengan sengaja mengasuransikan kredit perdagangan yang bermasalah dan berisiko tinggi untuk mengharapkan penggantian dari asuransi di kemudian hari.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu :

- 1) Penerimaan permintaan kredit limit dan atau perubahan serta dokumen pendukung dari calon tertanggung dan diregistrasi.
- 2) Dilakukan registrasi surat masuk dan verifikasi dokumen,
- 3) Setelah data lengkap dilakukan proses analisa kelayakan debitur/ buyer untuk penentuan kapasitas credit limit sesuai kriteria yang ditetapkan pada kebijakan standar analisa,
- 4) Apabila layak, dilakukan koordinasi dengan unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty sesuai SOP reasuransi.
- 5) Setelah disetujui unit reasuransi mengenai syarat dan ketentuan pola treaty, maka diterbitkan endorsement persetujuan credit limit dan surat pengantar ke tertanggung sekaligus menyampaikan produksi ke unit keuangan untuk dilakukan penagihan premi ke tertanggung,
- 6) Setelah menerima memo, persyaratan khusus polis (copy) dan manual pelaksanaan endorsement credit limit (copy) maka unit keuangan

mengirim surat penagihan ke tertanggung, 7) Penagihan sesuai SOP penagihan dan dilakukan proses monitoring dan penagihan lanjut, 8) Penerimaan pembayaran premi dan bukti pembayaran di unit keuangan dan akuntansi Kantor Cabang.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan Di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta, umumnya berasal dari pemohon, yaitu mengenai ketidaklengkapan dokumen, calon Tertanggung Tidak Memenuhi Pertimbangan 5C yaitu Karakter (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan permasalahan terakhir yaitu mengenai debitur/buyer yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Askrindo.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Hendaknya PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam mengabulkan permohonan asuransi kredit perdagangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip asuransi yaitu prinsip *Insurable Interest*, prinsip itikad baik/kejujuran dan prinsip *indemnity* (ganti kerugian).

Hendaknya PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Surakarta dalam memberikan klaim asuransi kredit perdagangan lebih berhati-hati, sehingga setiap klaim yang diberikan kepada tertanggung benar-benar kerugian yang dialami oleh tertanggung, bukan merupakan manipulasi atau persengkongkolan antara tertanggung dengan buyer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C. Arthur Williams Jr. and Richard M. Heins, 1987, *Risk Management and Insurance*, fifth edition, Mc. Graw-Hill Book Company
- Lexy Mooleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosdakarya, Bandung.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2002, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung : Alumni.
- Mark R. Greene, 1984, *Life And Health Insurance Companies As Financial Institutions*, LOMA.
- Moch. Chidir H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung : PT. Alumni.
- PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), 2012, “*Pedoman Produk Penjaminan Kredit Menengah*”, Jakarta.
- PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), 2009, “*Pedoman Produk Asuransi Kredit Perdagangan*”, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima.
- Soeisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeisno Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : salemba Empat.
- Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.